



Pendiri

Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP

DEWAN PEMBINA

Ketua Sekolah Tinggi Guru Huria

Pdt. Manaek Simanungkalit,

S. Th, M. Pd. K

Wakil Ketua I Bid. Akademik

Pdt. Hiburyanti Br. Marbun, M. Th

Ketua UPPM

Pdt. Jimmy M. Tambunan, M. Th

Dewan Redaksi

Pdt. Hiburyanti Br. Marbun, M. Th

Pdt. Azwar Anas Pasaribu, M. Th

Pdt. Haposan Cornelius Sinaga, M.A

Pemimpin Redaksi

Pdt. Jimmy M. Tambunan, M. Th

Design dan Layout

CGr. Jeremia R. Hasibuan, S. Pd

Sirkulasi

Fransiska Simanungkalit, S. Pd

Pebriyan Simanungkalit, S. Pd

Alamat Redaksi

Komp. Seminarium Sipoholon,
Desa Simanungkalit, Kec.
Sipoholon,

Kab. Tapanuli Utara

Web. <https://stghhkbp.ac.id/>

Diterbitkan Oleh

SEKOLAH TINGGI GURU HURIA HKBP SIPOHOLON

Komp. Seminarium Sipoholon, Desa Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli
Utara – Sumatera Utara - Indonesia, 22452

Email. stghhkbp01@gmail.com Web. <https://stghhkbp.ac.id/>

TEDEK SONGON INDAHAN DI BALANGA: SUATU KAJIAN TENTANG TAUTAN PRINSIP TRANSPARANSI DENGAN KEARIFAN LOKAL BATAK PADA PENGELOLAAN GEREJA

Sikkat Sitompul¹
STGH HKBP Sipoholon
tompulsikkat@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berisi kajian reflektif tentang penelusuran kemungkinan adanya interseksi (tautan) antara konsep manajemen modern dengan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan gereja. Pemikiran manajemen modern pada studi ini direpresentasikan oleh satu prinsip *good corporate governance*, yakni prinsip transparansi. Sementara representasi kearifan lokal yang dikaji bersumber dari tradisi lisan *umpama*, dalam budaya Batak Toba. Prinsip tata kelola organisasi yang baik sejatinya dapat meningkatkan rasa percaya dari para *stakeholder* bagi pihak pengelola organisasi sehingga berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Sementara itu, dalam komunitas masyarakat Batak Toba, nilai-nilai tersebut pada dasarnya dapat menciptakan keteraturan dan keharmonisan pada kehidupan di lingkungan komunitas, sehingga jika tidak diterapkan dapat menimbulkan perpecahan bahkan berakibat pada munculnya konflik berkepanjangan. Interseksi prinsip *good corporate governance* dengan nilai kearifan lokal Batak secara simultan tampaknya dapat digunakan dalam pengelolaan gereja, sebab tautan antara prinsip manajemen modern dan nilai kearifan lokal pada hakikatnya sama-sama membicarakan persoalan keterbukaan, anti korupsi, dan menjaga rasa saling percaya. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam perjumpaannya dengan nilai-nilai *umpama* Batak dapat diterapkan dalam pengelolaan gereja agar lebih dimengerti dan dihayati oleh para pelayan dan jemaat untuk meningkatkan pelayanan. Prinsip tata kelola yang baik sebagai buah pikiran manajemen modern nyatanya dapat semakin dipahami dan dihayati oleh para pelayan dan jemaat sebab nilai-nilai *umpama* telah lama diwarisi secara turun-temurun.

Kata kunci: gereja, tata kelola yang baik; *umpama*.

Abstract

This article contains a reflective study exploring the possibility of intersection between modern management concepts and local wisdom values in church management. Modern management concept in this study is represented by one principles of good corporate governance, namely the principle of transparency. Meanwhile, the representation of local wisdom studied comes from

¹ Pdt. Dr. Sikkat Sitompul, Dosen Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Sipoholon.

oral traditions, umpama, in Toba Batak culture. The principles of good corporate governance can actually increase the sense of trust of stakeholders in the management of the organization, so that it has an impact on improving overall organizational performance. Meanwhile, in the Toba Batak community, these values can basically create order and harmony in life within the community, so that if it's not implemented, can cause divisions and even result in the emergence of prolonged conflict. The intersection of good corporate governance principles with Batak local wisdom values simultaneously seems to be able to be used in church management, because the intersection between modern management principles and local wisdom values essentially both discuss issues of openness, anti-corruption and maintaining mutual trust. The principles of good governance and umpama Batak values can be applied in church management so that it's better understood and internalized by ministers and congregations to improve services. The principles of good governance as a modern management concept can in fact be increasingly understood and internalized by ministers and congregations because the values have long been inherited from generation to generation.

Keywords: church; good corporate governance; umpama.

1. Pendahuluan

Prinsip *Good corporate governance* (tata kelola organisasi yang baik), selanjutnya disingkat dengan GCG, pada dasarnya menekankan pentingnya hak *stakeholder* untuk mendapatkan informasi yang transparan, akurat dan tepat mengenai kinerja organisasi sehingga tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap manajemen organisasi akan semakin meningkat. Prinsip GCG memberi jaminan adanya pengungkapan informasi kinerja khususnya keuangan yang akurat dan adil serta disusun dengan standar kualitas yang baik sehingga penyelewengan dan kejahatan dalam bidang keuangan dapat dihindari. Prinsip tersebut sangat penting, memperhatikan bahwa terjadinya skandal korupsi dan kejahatan dalam bidang keuangan (*fraud*) sering terjadi sebagai akibat dari tidak diterapkannya prinsip tata kelola yang baik dalam organisasi.² Sebaliknya, penerapan tata kelola yang baik dapat memberi dampak pada peningkatan kinerja organisasi secara umum, baik dalam organisasi yang bersifat profit maupun non-profit.³

Penerapan tata kelola yang baik di sektor organisasi nonprofit telah banyak dilakukan, seperti pada lembaga pendidikan, pada lembaga swadaya masyarakat, atau pada organisasi yang bersifat sosial. Bahkan, penerapan tata

² Haryati, S., & Kristijadi, E. (2015). The Effect of GCG Implementation and Risk Profile on Financial Performance at Go-Public National Commercial Banks. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(3), 239.

³ Al-Haddad, L., & Whittington, M. (2019). The impact of corporate governance mechanisms on real and accrual earnings management practices: Evidence from Jordan. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 19 (6), 2.

kelola yang baik dalam lembaga keagamaan juga telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penerapan tata kelola yang baik telah dilakukan dalam gereja-gereja tua Benediktus dan Dominikus di Eropa.⁴ Penerapan GCG juga telah dilakukan dengan prinsip *syariah* dalam manajemen praktis lembaga keuangan Islam (IFMCs) di Malaysia.⁵ Peranan manajemen tata kelola yang baik memampukan gereja di Ghana untuk bertumbuh dan berkembang secara terus-menerus dan efektif.⁶

Gereja merupakan lembaga keagamaan yang kudus dan sejatinya menunjukkan diri sebagai lembaga suci yang memiliki standar moral yang tinggi melebihi organisasi sekuler dalam setiap kegiatannya, namun dalam kenyataannya aktivitas dan perilaku dalam kehidupan pengelola gereja terkadang menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan identitas gereja yang sebenarnya.⁷ Pada dekade terakhir, beberapa gereja yang sudah berdiri sejak lama dan telah memiliki jumlah jemaat yang banyak jumlahnya, dengan bangunan yang megah dan besar, serta sumber daya yang baik, namun pengelolaan organisasi masih mengalami berbagai permasalahan. Persoalan dalam pengelolaan manajemen keuangan gereja menjadi penting untuk diperhatikan, sebab beberapa media massa memberitakan penyelewengan dana keuangan gereja yang tidak sedikit jumlahnya. Diduga kejahatan dalam bidang keuangan tersebut bermula dari penyimpangan secara administratif. Kekeliruan dalam sistem administrasi keuangan gereja kadang terjadi karena anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, kurangnya pencatatan laporan dana yang masuk dan keluar, pemanfaatan dana secara pribadi oleh pengurus gereja tanpa pemberitahuan dalam laporan keuangan rutin, dan berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola dalam gereja belum berjalan dengan baik. Persembahan dan sumbangan yang diberikan jemaat sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita sering menimbulkan rasa kecewa karena pengelola gereja tidak menggunakan dana tersebut dengan semestinya. Manajemen dan tata kelola dalam gereja semakin lemah sebab tim pengawas dan kontrol internal keuangan gereja sering ditiadakan.⁸ Oleh karena itu, strategi pencegahan penyelewengan keuangan dalam

⁴ Wirtz, P. (2017). Governance of old religious orders: Benedictines and Dominicans. *Journal of Management History*, 23(3), 23.

⁵ Hasan, A. N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2020). *Shariah governance practices at Islamic fund management companies. Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 309.

⁶ Awuku- Gyampoh, R. K., & Ohemeng Asare, A. (2019). Assessing the Impact of Good Governance, Church Management and Structure on the Growth and Development of the Church. *International Journal of Business and Management*, 14(4), 99.

⁷ Wibowo, E. A., & Kristanto, H. (2017). Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal. *INTEGRITAS*, 3(2), 105.

⁸ Thompson, S., Niño De Guzmán Miranda, J. C., & Flores Laguna, O. (2024). Internal control and financial management in the treasury of a Caribbean religious organization. *Unaciencia Revista de Estudios e Investigaciones*, 17(32), 56–67.

gereja dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan dan manajemen keuangan, penguatan sistem otorisasi, penerapan *good corporate governance*, kepemimpinan, dan struktur manajemen, serta pentingnya pedoman dalam mengatur keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu upaya gereja dalam menghindari berbagai penyelewengan keuangan.

Selain itu, keberadaan gereja secara nyata tidak dapat dipisahkan dari kultur masyarakat sebagai basis di mana gereja hadir. Ajaran gereja tidak dapat dipisahkan dari konteks menyangkut nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama diwariskan dan di hidupi masyarakatnya. Secara khusus gereja-gereja yang bercirikan gereja kesukuan, sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal. Contohnya, masyarakat Batak dikenal sebagai suku yang memegang teguh nilai-nilai budayanya, dan beberapa gereja bercirikan kesukuan telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakatnya. Pada umumnya, nilai-nilai tradisi tersebut sangat melekat kuat dalam kehidupan masyarakat yang dijiwai dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga pada kehidupan agama. Sebagai sebuah ajaran tentang kehidupan, tentunya nilai-nilai kearifan lokal Batak banyak mengandung kebaikan yang sejatinya dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi agar lebih baik. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji interseksi (tautan/ titik temu) antara prinsip *good corporate governance* sebagai buah pikiran manajemen modern yaitu prinsip transparansi dalam nilai kearifan lokal untuk meningkatkan pengelolaan organisasi yang lebih baik secara khusus dalam pengelolaan keuangan gereja.

2. Telaah Pustaka

2.1 *Good Corporate Governance*

Secara etimologi, istilah *governance* berasal dari kosa kata bahasa Prancis yaitu *gubernance* yang berarti “pengendalian”. Perkembangan selanjutnya, istilah tersebut berkembang pemaknaannya karena meluas diterapkan pada konteks kegiatan korporasi dan di berbagai lembaga atau organisasi, sehingga lebih dikenal dengan sebutan *corporate governance*.⁹ Terjemahan istilah tersebut dalam Bahasa Indonesia dipadankan atau diterjemahkan sebagai aktivitas pengelolaan atau tata kelola/ tata pemerintahan suatu organisasi/ perusahaan. Selanjutnya, istilah *good corporate governance* sendiri dapat dibatasi sebagai suatu pola relasi, sistem, dan proses yang difungsikan oleh pihak manajemen untuk memberikan *added value* kepada pemegang saham secara berkesinambungan pada kerangka waktu panjang, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.¹⁰

⁹ Kieff, F. S., & Paredes, T. (2010). *Perspectives on corporate governance*. Cambridge University Press, 14.

¹⁰ Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. PT. Norlive Kharisma Indonesia, 15.

Secara historis, istilah *good corporate governance*, pertama sekali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992, saat melaporkan kegiatannya. Laporan itu terkenal dengan nama Cadbury Report. Laporan tersebut dianggap sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik GCG di seluruh dunia. Tidak ketinggalan pula dengan kondisi di Indonesia, *corporate governance* juga menjadi salah satu *critical issue* dalam berbagai organisasi, baik sektor profit maupun nonprofit. Aturan-aturan yang dirambukan dalam GCG dapat dilihat sebagai panduan pengelolaan korporasi, tidak hanya bagi para pimpinan namun juga seluruh pegawai/ elemen perusahaan. Hal itu dimaksudkan agar semua keputusan yang dihasilkan dan tindakan yang dilakukan semata-mata purnpun pada kepentingan organisasi. Kepentingan perusahaan dalam hal ini bukan hanya menyangkut pemegang saham dan para pimpinan perusahaan, namun menyangkut juga para *stakeholder* yang ada. Satu hal yang penting dari kerangka prinsip GCG adalah bahwa semua kegiatan korporasi tidak bertentangan atau harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.¹¹

Secara umum, terdapat lima prinsip dasar dalam GCG, yaitu: (1) Keterbukaan (*transparency*), menyangkut keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi. (2) Akuntabilitas (*accountability*), menyangkut kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban pihak manajemen sehingga pengelolaan korporasi terlaksana secara efektif dan efisien. (3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. (4) Kemandirian (*independency*), yakni suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh/ intervensi dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. (5) Kesetaraan (*fairness*), merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang muncul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

2.2 Tata Kelola Gereja

Penerapan GCG pada lembaga gereja mempunyai prinsip dasar sama dengan *corporate governance* yang menitik-beratkan pada tujuan pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. Namun demikian, model tata kelola *corporate governance* tidak dapat diterapkan secara langsung pada *church governance*. Dibutuhkan penyesuaian dan pemahaman lebih mendalam agar prinsip *church*

¹¹ Tricker, R. I. (2003). *Essential director*. Profile Books, 23.

¹² Gani, A. M., Kurniawan, K., & Hirsanuddin, H. (2020). Implementation of Good Corporate Governance Principles in Commercial Banks. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(10), 404.

governance dapat diterapkan dengan tepat karena gereja memiliki sistem, standar dan struktur yang berbeda dengan korporasi lainnya. Secara tradisional gereja umumnya memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari tiga macam tipe, yaitu episkopal, presbiterial dan kongregasional. Sistem pemerintahan dalam gereja tersebut lahir berdasarkan pada konteks tertentu yang kemudian diwariskan pada konteks zaman yang berbeda sehingga budaya, pemahaman, falsafah hidup berpengaruh pada tipe sistem pemerintahan dalam gereja tertentu.¹³

Permasalahan pengelolaan keuangan dalam beberapa gereja menunjukkan bahwa penerapan prinsip manajemen khususnya tata kelola belum dilakukan dengan baik. Hal ini terutama dipengaruhi oleh sikap pemimpin gereja dan jemaat terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik kurang mendapat perhatian serius. Setidaknya terdapat empat sikap gereja terhadap peran tata kelola gereja yang baik, yaitu: *Pertama*, adanya penolakan pemimpin gereja terhadap penerapan sistem akuntansi dalam keuangan gereja.¹⁴ Penolakan tersebut terjadi dengan asumsi bahwa pemimpin dan pengelola keuangan gereja menganggap keuangan dan aset merupakan pemberian jemaat secara sukarela yang dipersembahkan sehingga menjadi sepenuhnya milik Tuhan dan dimanfaatkan oleh pelayan gereja. *Kedua*, adanya persepsi yang berbeda antara akuntan dan rohaniawan tentang tata kelola gereja yang baik.¹⁵ Perbedaan persepsi tersebut terjadi ketika para pemimpin gereja menganggap diri lebih mampu dan memiliki kecakapan khusus dalam mengelola gereja sehingga prinsip tata kelola harus berbeda dari organisasi lainnya. *Ketiga*, terdapat kesadaran pemimpin gereja bahwa penerapan tata kelola yang lemah akan menimbulkan penyalahgunaan keuangan dan aset gereja.¹⁶ Namun, masih terkendala oleh kurangnya kemampuan dan kecakapan dari pemimpin gereja maupun dari kalangan jemaat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. *Keempat*, terdapat kesadaran bersama antara pemimpin gereja dan jemaat tentang pentingnya penerapan sistem tata kelola yang baik dan harus diterapkan dalam mengelola gereja.¹⁷ Persepsi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap pengelola gereja dalam memahami dan menerima prinsip tata kelola yang baik, yakni ada yang menolak, memperdebatkan, memiliki kesadaran, dan menerima penerapan sistem tata kelola yang baik dalam mengelola gereja.

¹³ Erickson, M. J. (1998). *Christian theology* (2nd ed). Baker Book House, 18.

¹⁴ Muller, R. (2015). Incarnation theology versus the sacralisation of authority. *HTS Theologies Studies / Theological Studies*, 71(3), 9.

¹⁵ Jacobs, K. (2005). The sacred and the secular: Examining the role of accounting in the religious context. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(2), 189–210.

¹⁶ Kistler, D. S. (2008). *Examining the Protestant Church's financial environment, internal controls, and financial integrity*. Prescott Valley, 15.

¹⁷ Irvine, H. (2005). Balancing money and mission in a local church budget. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(2), 211–237.

Penerapan tata kelola yang baik dalam gereja akan membawa dampak yang baik dalam pertumbuhan jemaat, sebaliknya pengelolaan yang tidak baik akan menimbulkan dampak yang buruk seperti terjadinya konflik dan perpecahan dalam internal gereja. Oleh karena itu, gereja sepatutnya harus menerapkan sistem manajemen yang baik dengan mempertimbangkan beberapa dasar pemikiran berikut ini: *Pertama*, secara teologis, teks Alkitab sebagai dasar pengajaran dalam gereja menjelaskan secara tersirat tentang pentingnya tata pengelolaan yang baik. Kisah-kisah pengelolaan yang baik dalam Perjanjian Lama membuktikan bahwa Alkitab secara tegas menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik. Manajemen logistik pangan raksasa yang dilakukan oleh Yusuf (Kej. 41-43); manajemen kepemimpinan terhadap umat Allah yang disarankan oleh Yitro kepada Musa (Kel. 18: 1-27; Bil. 11:11, 15, 17); serta pembangunan kembali tembok Yerusalem oleh Nehemia yang menunjukkan semua aspek utama dalam ilmu manajemen modern saat ini (Neh. 1-13). Selain itu, dalam Perjanjian Baru juga menunjukkan pentingnya pengelolaan yang baik. Lukas 12: 42-48 mengajarkan orang Kristen supaya menjadi pelayan yang baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mengelola pekerjaan. Yesus menjelaskan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur (Lukas 15: 1-9), kesetiaan dalam perkara-perkara kecil (Lukas 15: 10-13), bahkan dalam Alkitab dituliskan “karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya dihadapan Tuhan, tetapi juga dihadapan manusia” (II Korintus 8: 21). *Kedua*, gereja memiliki sumber dana yang dikumpulkan melalui donasi dan sumbangan jemaatnya sehingga sangat dibutuhkan *trust* terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan.¹⁸ Jika jemaat tidak memiliki rasa percaya kepada pengelola keuangan gereja maka muncul dampak buruk pada keberlangsungan sumber pendanaan sehingga program dan rutinitas gereja akan mengalami kendala bahkan keberlangsungan hidup gereja sebagai organisasi akan terhambat. *Ketiga*, gereja merupakan organisasi atau wadah persekutuan yang bersentuhan langsung dengan perilaku kehidupan jemaat, sehingga ajaran dan cara hidup gereja memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur dan membina pola kehidupan masyarakat, sejatinya menjadikan gereja sebagai model yang baik tentang kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sebuah organisasi.

3. Pembahasan

Sastra Batak memiliki beberapa unsur yang sangat terkenal, misalnya *umpama* (perumpamaan) dan *umpasa* (pantun). Namun, sejatinya *umpama* telah mencakup *umpasa* (pepatah), *tudosan* (kiasan), *pandohan* (ungkapan), dan *ende-*

¹⁸ Tjandra, M., Hermanto, Y. P., & Hindrajat, J. (2021). Konstruksi Etis Teologis tentang Investasi Keuangan Gereja: Analisis Lukas 19:16-24. *Shamayim: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 75–83.

ende (nyanyian).¹⁹ Selanjutnya, *umpama* dibagi menjadi empat bagian, yaitu: *Pertama*: berisi berkat, kesejahteraan, perlindungan dan segala yang berguna sebagai karunia Tuhan kepada ciptaan-Nya. *Kedua*: berisi kiasan yang memperbandingkan, ibarat antara sesuatu dengan yang terdapat di sekitarnya. *Ketiga*: berisi nyanyian atau lagu yang khusus untuk dinyanyikan. *Keempat*: berisi kata-kata bijak, kemuliaan, adat-istiadat, hukum dan peraturan.²⁰ Sementara itu, *umpasa* juga dapat dianggap sebagai pantun yang sarat dengan keinginan untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan. Menurut bidangnya, *umpasa* dikategorikan menjadi empat bidang, yakni berhubungan dengan filsafat, etika, hukum, dan hubungan sosial. Hal yang membedakan *umpama* dan *umpasa* adalah isinya, bahwa *umpasa* berisi berkat yaitu harapan atau cita-cita terhadap sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.²¹ Berkat tersebut berupa kekayaan, keturunan, atau kemajuan komunitas bersama, kesejahteraan dan kesehatan. Oleh karena itu, istilah peribahasa dalam merangkum pengertian *umpama* dan *umpasa* dalam budaya Batak.²²

Pada perjalanannya yang panjang, sastra Batak dapat dikatakan bahwa *umpama* dan *umpasa* sangat unik, sebab pada kenyataannya keduanya tidak berkembang dan tidak hilang seperti unsur sastra Batak lainnya. Perubahan apa pun ucapan yang diterapkan pada *umpama* dan *umpasa* akan dianggap keliru. Tidak asal enak di dengar atau menggelitik selera humor belaka, namun setiap kata-katanya harus mengandung makna mendalam dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Namun, sastra tersebut masih relevan hingga saat ini terutama pada saat pelaksanaan upacara adat-istiadat Batak, sebab pada saat *parhataan* (kata-kata formal) *umpama* dan *umpasa* memegang peranan penting di mana penutur selalu mengutip peribahasa Batak tersebut. Siapa pun dapat menggunakan peribahasa dalam upacara adat, bahkan semakin banyak menggunakannya dianggap sebagai orang yang dihormati sebab mampu memahami adat dengan baik. Ungkapan tersebut bukanlah milik pribadi atau sekelompok orang tertentu, namun milik bersama sebagai komunitas masyarakat Batak. Oleh karena itu, pengarang dari semua *umpama* dan *umpasa* Batak tidak

¹⁹ Warneck, J. (1903). *Umpama angka na masa di Habatahon: Si Antar, Sumatra, Rongkoman*. Rhein Mission Press, 5.

²⁰ Sibarani, Parda. A. N. (1979). *Umpama Batak dohot Lapatanna*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 5.

²¹ Sinaga, R. (2011). *Umpama, umpama, dan ungkapan dalam Bahasa Batak Toba* (3rd ed.). Dian Utama, 6.

²² Sitompul, A. A. (1998). *Peribahasa Batak di sekitar Danau Toba: Pedoman hidup dalam adat istiadat hukum tradisi agama dan ideologi. Gaya bahasa, jenis sastra, fungsi sosial agama dan maknanya masa kini*. Yayasan Kebangkitan Hidup Baru dan Yayasan Perhimpunan Pecinta Danau Toba, 7.

diketahui, diduga bahwa sastra tersebut dihasilkan oleh orang-orang bijak di kalangan masyarakat Batak pada masa lampau.²³

Konsep tata kelola yang baik secara tersurat tidak ditemukan dalam sastra Batak, namun prinsip-prinsipnya telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Batak. Peribahasa Batak berisi etika, hukum, dan hubungan sosial, artinya bahwa *umpama* dan *umpasa* juga menjadi petunjuk bagaimana orang Batak memiliki sikap keterbukaan dalam hidupnya. Prinsip transparansi menyangkut keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi. Dalam perumpamaan Batak disebutkan “*Tedek songon indahan di belanga*”. Secara bebas dapat diterjemahkan: “Terbuka seperti makanan di belanga”. Belanga sebagai tempat memasak berbagai jenis makanan dibuat oleh pandai besi tidak memiliki pasangan sebagai penutup. Namun, jika sangat diperlukan, misalnya supaya makanan cepat panas, atau menjaga makanan supaya tidak *marpiltihan* (tumpah keluar) dari belanga, maka dapat digunakan perlengkapan lainnya untuk menutup belanga, seperti daun pisang atau *anduri* (tampi). Namun, nyatanya penutup tersebut fungsinya tidaklah ideal karena hanya sebagai alat bantu. Dari *umpama* tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Batak memandang bahwa segala sesuatu yang dipaksa ditutupi tidak ideal atau tidak baik. Informasi mengenai apa pun haruslah disampaikan dengan jujur, terbuka dan transparan. Artinya, masyarakat Batak sangat menjunjung tinggi transparansi dan keterbukaan. Segala sesuatu yang seharusnya disampaikan dengan terbuka, namun berusaha untuk ditutupi akan menimbulkan persoalan atau konflik.

Kehadiran gereja dalam wujud pengajaran kasih selalu hidup berdampingan dengan tradisi lokal masyarakatnya. Kalaupun gereja secara dogmatis terpisah karena landasan teologis yang memberikan lokus tersendiri bagi anggota jemaatnya, bukan berarti gereja menjadi terpisah begitu saja dalam budaya masyarakat. Gereja harus hadir dalam melaksanakan panggilannya di tengah masyarakat dengan pengaruh tradisi lokal di dalamnya. Sejatinya tradisi lokal yang baik dapat dijadikan sebagai dukungan terhadap peningkatan pelayanan gereja, dan bukan sebagai kenyataan yang perlu dipertentangkan. Walaupun pada kesempatan lain bahwa tradisi lokal tidak selamanya bisa dipaksakan dalam kehidupan gereja dan akhirnya sering terjadi konflik batin dan pilihan dilematis bagi jemaat antara mengikuti ajaran gereja atau melaksanakan tuntutan tradisi lokal. Namun, ajaran gereja dan tradisi lokal perlu dipersatukan untuk membangun hidup jemaat yang lebih baik dalam iman maupun kehidupan sosialnya sehari-hari. Munculnya masalah ketidaksesuaian bahkan pertentangan antara tradisi dan dogma merupakan cerminan bagaimana relasi antara ajaran gereja dan tradisi lokal

²³ Sihombing, B. (2004). Batak and Wealth: A Critical Study of Materialism in the Batak Churches in Indonesia. *Mission Studies*, 21(1), 9–37.

tidak dibangun dalam fondasi filosofis dan kontekstual yang mengedepankan hakikat sebuah tautan daripada sekedar relasi yang sifatnya semu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengertian gereja secara teologis merupakan persekutuan orang-orang kudus, namun wujudnya sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan utamanya adalah pelayanan perlu dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya adalah supaya gereja dapat menjalankan panggilannya di dunia dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Aktivitas pengelolaan gereja yang baik perlu didesain dengan panduan yang telah berlaku secara umum, yakni dengan mengimplementasikan prinsip transparansi. Namun, sebagaimana disebutkan di atas bahwa gereja hadir dalam konteks tradisi masyarakat lokal, prinsip-prinsip tata kelola yang baik perlu diinterpretasikan dalam konteks lokal juga. Pada masyarakat Batak, prinsip-prinsip tersebut diinterpretasikan dalam berbagai *umpama* Batak sebagai ajaran atau falsafah hidup yang sudah lama diwariskan secara turun-temurun. Tujuannya tidak lain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik kepada para pelayan gereja, sebab gereja HKBP sangat erat kaitannya dengan tradisi lokal Batak. Melalui interpretasi prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dalam berbagai tradisi Batak diharapkan bahwa para pelayan HKBP akan lebih memahami tentang tata kelola yang baik secara mendalam sebab prinsip-prinsipnya sudah ditemukan dalam tradisi lokal masyarakat Batak yakni dalam berbagai *umpama* Batak yang telah lama diwariskan leluhurnya.

Melalui uraian di atas dapat dipahami bahwa betapa terdapat tautan yang jelas antara nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dengan prinsip manajemen modern semacam GCG. Upaya interpretasi prinsip tersebut dalam kearifan lokal masyarakat Batak dalam berbagai *umpama* Batak dapat memberi kesadaran dan mampu mendukung para pelayan gereja HKBP dalam menjelaskan prinsip manajemen modern dalam bahasa yang lebih mudah dipahami kaum awam, terutama jemaat yang mayoritas adalah orang Batak. Lokalitas *local wisdom* orang Batak dan prinsip tata kelola yang baik dapat dipersandingkan dengan kompatibel. Interpretasi berbagai nilai yang terkandung dalam *umpama* Batak dapat disuntikkan dalam tubuh spirit tata kelola agar memberikan daya yang semakin kuat untuk mengimplementasikannya dalam mengelola gereja HKBP yang lebih baik. Tentunya hasil pemikiran yang bersifat konseptual ini memerlukan eksekusi yang lebih baik dan berani oleh para pelayan gereja HKBP di tengah-tengah ancaman persoalan pengelolaan gereja termasuk peluang tindakan korupsi yang mengancam kekudusan gereja di tengah kehidupan jemaatnya yang semakin sekuler. Pemimpin gereja yang reflektif namun tetap *risk taker* misalnya, diperlukan untuk mencoba bagaimana hasil pemikiran yang bersifat konseptual ini menjadi empiris di tangan seorang pelayan gereja HKBP yang tugasnya untuk menggembalakan jemaat sekaligus sebagai manajer dalam memimpin organisasi gereja. Oleh karena itu, pertautan interpretasi nilai-nilai kearifan lokal *umpama* Batak untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG

bukanlah pemikiran *absurd*, namun sejatinya dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi para pelayan HKBP yang reflektif-kontemplatif sebagai dukungan dalam menerapkan konsep pengelolaan gereja yang baik. Keberanian para pelayan gereja HKBP untuk membuat program-program kerja pelayanan dan manajemen keuangan gereja yang dipandu dengan prinsip-prinsip GCG, kemudian menerapkannya secara konsisten tidaklah perkara mudah, sebab interpretasi terhadap suatu pemikiran filosofi dapat saja menghasilkan pandangan yang berbeda. Namun, kesulitan itu setidaknya bisa direduksi dengan pandangan bersama terhadap upaya pengelolaan gereja yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai garam dan terang dunia.

4. Kesimpulan

Mengacu pada analisis data yang didapatkan melalui studi pustaka dari beberapa artikel, buku, dan dokumen yang diperlukan, dapat disimpulkan bahwa interpretasi terhadap *umpama* Batak, ternyata maknanya bertautan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (tata kelola organisasi yang baik). Prinsip keterbukaan (transparansi) bertautan maknanya dengan peribahasa Batak yang menyatakan: “*tedek songon indahan di balanga*”. Prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan organisasi yang baik memiliki tautan dengan nilai kearifan lokal Batak yang terdapat dalam beberapa *umpama* Batak. Implementasi prinsip tata kelola yang baik dalam gereja HKBP dapat dilakukan dengan menambahkan makna *umpama* Batak sehingga penerapannya lebih dipahami oleh jemaat dan pelayan, sehingga semua program kerja dan keuangan gereja dapat dikelola dengan baik. Tata kelola yang baik dalam gereja dapat mencegah berbagai penyelewengan dan skandal keuangan yang mulai menggerogoti kekudusan gereja dalam menjalankan tugasnya sebagai garam dan terang di tengah dunia. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada para pelayan dan juga jemaat gereja HKBP agar serius dalam mengelola gereja dalam semua program pelayanan maupun kinerja keuangan untuk peningkatan pelayanan. Pelayanan yang baik dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, sebab secara konseptual ditemukan bahwa prinsip tata kelola organisasi yang baik dan makna *umpama* Batak secara simultan dapat digunakan dalam pengelolaan gereja. Tautan antara prinsip manajemen modern dan nilai kearifan lokal pada hakikatnya sama-sama membicarakan persoalan keterbukaan, dan anti terhadap tindakan korupsi.

Daftar Pustaka

- Al-Haddad, L., & Whittington, M. (2019). The impact of corporate governance mechanisms on real and accrual earnings management practices: Evidence from Jordan. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 19(6), 1167–1186. <https://doi.org/10.1108/CG-05-2018-0183>
- Awuku- Gyampoh, R. K., & Ohemeng Asare, A. (2019). Assessing the Impact of Good Governance, Church Management and Structure on the Growth and Development of the Church. *International Journal of Business and Management*, 14(4), 99. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v14n4p99>
- Erickson, M. J. (1998). *Christian theology* (2nd ed). Baker Book House.
- Gani, A. M., Kurniawan, K., & Hirsanuddin, H. (2020). Implementation of Good Corporate Governance Principles in Commercial Banks. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(10), 404. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2153>
- Haryati, S., & Kristijadi, E. (2015). The Effect of GCG Implementation and Risk Profile on Financial Performance at Go-Public National Commercial Banks. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(3). <https://doi.org/10.22146/jieb.6471>
- Hasan, A. N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2020). Shariah governance practices at Islamic fund management companies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 309–325. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2017-0045>
- Irvine, H. (2005). Balancing money and mission in a local church budget. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(2), 211–237. <https://doi.org/10.1108/09513570510588733>
- Jacobs, K. (2005). The sacred and the secular: Examining the role of accounting in the religious context. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(2), 189–210. <https://doi.org/10.1108/09513570510588724>
- Kieff, F. S., & Paredes, T. (2010). *Perspectives on corporate governance*. Cambridge University Press.
- Kistler, D. S. (2008). *Examining the Protestant Church's financial environment, internal controls, and financial integrity*. Prescott Valley.
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Muller, R. (2015). Incarnation theology versus the sacralisation of authority. *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 71(3), 9 pages. <https://doi.org/10.4102/hts.v71i3.2707>
- Sibarani, Parda. A. N. (1979). *Umpama Batak dohot Lapatanna*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Sihombing, B. (2004). Batak and Wealth: A Critical Study of Materialism in the Batak Churches in Indonesia. *Mission Studies*, 21(1), 9–37. <https://doi.org/10.1163/1573383041154348>

- Sinaga, R. (2011). *Umpama, umpama, dan ungkapan dalam Bahasa Batak Toba* (3rd ed.). Dian Utama.
- Sitompul, A. A. (1998). *Peribahasa Batak di sekitar Danau Toba: Pedoman hidup dalam adat istiadat hukum tradisi agama dan ideologi. Gaya bahasa, jenis sastra, fungsi sosial agama dan maknanya masa kini*. Yayasan Kebangkitan Hidup Baru dan Yayasan Perhimpunan Pecinta Danau Toba.
- Suparman, H., & Widodo, W. (2023). How school governance affects teachers' organizational citizenship behavior? *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1480. <https://doi.org/10.29210/020233158>
- Thompson, S., Niño De Guzmán Miranda, J. C., & Flores Laguna, O. (2024). Internal control and financial management in the treasury of a Caribbean religious organization. *Unaciencia Revista de Estudios e Investigaciones*, 17(32), 56–67. <https://doi.org/10.35997/unaciencia.v17i32.770>
- Tjandra, M., Hermanto, Y. P., & Hindrajat, J. (2021). Konstruksi Etis Teologis tentang Investasi Keuangan Gereja: Analisis Lukas 19:16-24. *Shamayim: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 75–83.
- Tricker, R. I. (2003). *Essential director*. Profile Books.
- Tukaram, S. S. (2013). Study on Corporate Governance and NGO's]. *International Journal of Transformations in Business Management*, 2(3).
- Warneck, J. (1903). *Umpama angka na masa di Habatahon: Si Antar, Sumatra, Rongkoman*. Rhein Mission Press.
- Wibowo, E. A., & Kristanto, H. (2017). Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal. *INTEGRITAS*, 3(2), 105. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.104>
- Wirtz, P. (2017). Governance of old religious orders: Benedictines and Dominicans. *Journal of Management History*, 23(3), 259–277. <https://doi.org/10.1108/JMH-02-2017-0007>